

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA

**PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI TERPADU
(KODE 1583)**

1. PENGEMBANGAN FASILITASI TERPADU INVESTASI HORTIKULTURA (FATIH)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek pendukung pengembangan hortikultura adalah adanya investasi yang melibatkan berbagai pihak baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang saling terkait. Investasi hortikultura selama ini masih belum terfasilitasi secara optimal antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya. Dengan demikian, proses yang dilaksanakan masih kurang efektif dan efisien sehingga berdampak pada rendahnya daya saing industri hortikultura. Oleh karena itu diperlukan inovasi masyarakat dan pemerintah baik untuk memperbaiki kinerja sistem segmen rantai pasokan yang sudah ada maupun membangun rantai pasokan yang baru. Investasi tersebut memerlukan fasilitasi berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kewenangan yang berbeda. Berbagai instansi dan institusi penyedia layanan investasi tersebut perlu dikoordinasikan agar fungsi pelayanan dalam berbagai aspek faktor penentu keberhasilan investasi (kebijakan, prasarana, sarana, modal dan teknologi, kelembagaan, SDM, sistem informasi dan lain-lain) berjalan secara sinergis. Oleh karena itu dibangun suatu jejaring kerja untuk memwadahi fasilitasi secara terpadu untuk mendorong dan merealisasikan investasi hortikultura.

Pengembangan agribisnis hortikultura tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pengembangan agribisnis hortikultura sangat tergantung seberapa jauh kelembagaan pemerintah di luar sektor pertanian memberikan perhatian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan investasi dari berbagai pihak, baik pemerintah (pusat dan daerah), pihak swasta (pelaku usaha), petani maupun masyarakat, bahkan bantuan dari pihak asing sekalipun. Terobosan pemikiran telah dirancang untuk menggerakkan berbagai pihak untuk meningkatkan investasi atau memberikan kemudahan dalam berinvestasi di bidang agribisnis hortikultura melalui penerapan konsep Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura.

Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH) merupakan upaya yang digunakan untuk menciptakan iklim usaha di bidang hortikultura yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk. FATIH mengintegrasikan pelayanan dan program dari seluruh kelembagaan pemerintah dan non pemerintah yang berperan dalam pengembangan usaha, pengembangan kawasan, penerapan GAP/SOP, pembenahan SCM dan penataan rantai pasokan komoditas hortikultura, serta promosi dan akselerasi ekspor.

Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura dilaksanakan secara bertahap dalam perspektif waktu yang bersifat tahunan (*multi years*). Melalui Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura seluruh kelembagaan pemerintah dan non pemerintah yang terkait di

dorong untuk dapat memfokuskan prioritas pengembangan wilayah dan berhubungan secara terbuka dan sinergis.

Dengan Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura para investor diharapkan dapat lebih tertarik dan percaya diri untuk menanamkan investasinya mengingat pemerintah menyiapkan kondisi yang lebih kondusif melalui upaya: 1) pengembangan iklim usaha yang lebih kondusif dengan memperjelas program pengembangan di masing-masing sentra, dan memperjelas komitmen pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan komitmen para pelaku agribisnis yang terkait, dan 2) membenahan pelayanan jasa publik sehingga dapat mengurangi hambatan usaha baik berupa peninjauan regulasi, pengurangan pungutan baik resmi maupun tidak resmi dalam proses perizinan dan percepatan proses perizinan, 3) peningkatan daya saing komoditi hortikultura dengan pengembangan kawasan, penerapan GAP dan membenahan *supply chain management* (SCM) setiap komoditas hortikultura terutama yang berorientasi ekspor dan komoditas yang berfungsi sebagai substitusi impor, serta 4) melakukan promosi dan akselerasi ekspor.

Keempat upaya tersebut harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi serta komitmen bersama antara pemerintah dengan para pelaku usaha dan para petani. Komitmen ini diperlukan agar pemerintah yang direpresentasikan oleh Departemen dan lembaga pemerintah non departemen di pusat dan direpresentasikan oleh dinas/badan baik di tingkat propinsi

maupun di tingkat kabupaten/kota dapat mengintegrasikan pelayanannya dalam satu jejaring kerja yang saling bergantung dan saling mendukung sehingga mampu memberikan fasilitasi investasi hortikultura secara terpadu. Komitmen yang tumbuh baik antara kelembagaan pemerintah tersebut maupun antara pemerintah dengan investor dan pelaku usaha pada sistem pendukung akan terus dibina.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong pelayanan investasi di bidang agribisnis hortikultura di tingkat propinsi.

Sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya minat masyarakat/para pelaku usaha untuk melakukan investasi di bidang hortikultura,
2. Meningkatnya pelayanan investasi hortikultura melalui Fasilitasi Investasi Terpadu Hortikultura (FATIH) di Kawasan Hortikultura,
3. Tersusunnya rancang bangun pengembangan investasi hortikultura

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di ProVinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada dinas pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 33 propinsi di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Komponen Kegiatan

Komponen Kegiatan Fasilitas Investasi Terpadu Hortikultura di 33 propinsi meliputi : Fasilitas Pembentukan Asosiasi/Gapoktan Hortikultura, Rapat koordinasi asosiasi pelaku usaha hortikultura, Koordinasi Investasi Pengembangan Hortikultura, Fasilitas Pengembangan Investasi Hortikultura, Pertemuan Fasilitas Pengembangan FATIH Hortikultura, Fasilitas Forum Bisnis, Penguatan kelembagaan/Gapoktan/Asosiasi, Pembinaan Kelembagaan Asosiasi Hortikultura, Penyusunan Profil Industri Hortikultura, Penyusunan rancang bangun pengembangan hortikultura 2010-2014, Temu konvensi rancang bangun dengan stakeholder

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Bidang Produksi atau Bidang yang menangani hortikultura di propinsi dengan penanggung

jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah petugas/petani/pelaku usaha/pemangku kepentingan di wilayah propinsi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Dekonsentrasi pada DIPA Satker Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 33 propinsi dan dialokasikan dalam bentuk belanja bahan, barang non operasional lainnya, belanja modal fisik lainnya.

5. Metode

Secara umum kegiatan FATIH adalah kegiatan yang mendukung dan menumbuh kembangkan investasi dalam pengembangan hortikultura di provinsi. Secara rinci metoda pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembuatan profil investasi dan penyusunan rancang bangun investasi hortikultura dilaksanakan dalam bentuk pertemuan temu konvensi rancang bangun dan penyusunan buku dengan melibatkan pihak terkait (institusi yang menangani Perizinan, Perdagangan, PU, dll.) dan narasumber yang ahli dibidang perencanaan wilayah, bisnis dan manajerial.
- b. Fasilitasi pembentukan asosiasi pelaku usaha dilaksanakan dalam bentuk pertemuan untuk membentuk kelompok pelaku usaha sesuai dengan komoditas yang dikembangkan melibatkan para pelaku investasi, unit

eselon I terkait, stakeholders terkait lainnya, serta dinas pertanian daerah.

- c. Kegiatan Rapat Asosiasi dan Temu Koordinasi Investasi Hortikultura dilaksanakan dalam bentuk temu bisnis/pertemuan yang melibatkan para pelaku investasi hortikultura di Provinsi, Kabupaten/Kota penerima dana alokasi FATIH serta pemangku kepentingan yang berasal dari unsur produsen, pedagang/pelaku usaha dan petugas pembina.
- d. Fasilitasi forum agribisnis hortikultura dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dilaksanakan melalui pertemuan dengan melibatkan para pelaku investasi hortikultura, unit eselon I terkait, stakeholders, dan dinas propinsi yang mendapat alokasi dana FATIH
- e. Penguatan dan Pembinaan kelembagaan asisoasi hortikultura dilaksanakan melalui pendampingan, pengawalan dan pembinaan asosiasi di propinsi melibatkan stakeholder dan dinas pertanian daerah terkait.
- f. Kegiatan fasilitasi pengembangan FATIH, dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dalam rangka identifikasi kelompok tani dikawasan hortikultura, pertemuan FATIH dengan intansi terkait (pemerintah, pihak swasta/pelaku usaha, petani, maupun masyarakat), dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan hortikultura

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha, pemangku kepentingan)
3. Data dan informasi mengenai potensi wilayah.

B. Keluaran (Output)

1. Tersedianya buku profil dan terselenggaranya rancang bangun pengembangan hortikultura
2. Terselenggaranya kegiatan pertemuan konvensi rancang bangun pengembangan investasi hortikultura
3. Terselenggaranya pertemuan dalam rangka pembentukan asosiasi pelaku usaha
4. Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan petani (Gapoktan, Asosiasi)
5. Terselenggaranya kegiatan pertemuan koordinasi investasi dalam rangka membangun komitmen pengembangan hortikultura antar pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah)
6. Terlaksananya pembinaan kelembagaan, asosiasi hortikultura

7. Terlaksananya identifikasi kelompok tani dan pertemuan FATIH
8. Terfasilitasinya forum agribisnis hortikultura

C. Hasil (Outcome)

Terbangunnya komitmen kerjasama pengembangan hortikultura antar pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah).

D. Manfaat (Benefit)

Dukungan dari semua pemangku kepentingan dapat direalisasi.

E. Dampak (Impact)

Semakin berkembangnya usaha agribisnis dibidang hortikultura

Lampiran 1**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN FASILITASI TERPADU INVESTASI
HORTIKULTURA (FATIH) TAHUN 2010**

No.	PROPINSI
1	Nanggroe Aceh Darussalam
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	Sumatera Selatan
7	Bengkulu
8	Lampung
9	Bangka Belitung
10	Jawa Barat
11	Banten
12	Jawa Tengah
13	DKI Jakarta
14	D.I Yogyakarta
15	Jawa Timur
16	Kalimantan Barat
17	Kalimantan Timur
18	Kalimantan Selatan
19	Kalimantan Tengah
20	Sulawesi Utara
21	Sulawesi Selatan
22	Sulawesi Tengah
23	Sulawesi Barat
24	Sulawesi Tenggara
25	Bali
26	Nusa Tenggara Barat
27	Nusa Tenggara Timur
28	Gorontalo
29	Papua
30	Papua Barat
31	Maluku
32	Maluku Utara
33	Kepulauan Riau
TOTAL 33 PROPINSI	

2. PENGEMBANGAN PENERAPAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk hortikultura dalam negeri saat ini baru mampu memasok kebutuhan konsumen dalam negeri/pasar tradisional dan masih sangat sedikit yang diekspor. Sistem produksi di lokasi yang terpencar, skala usaha sempit dan belum efisien serta jumlah produksi yang terbatas menjadi penyebab utama bahwa produk hortikultura nasional kurang kompetitif di pasar internasional.

Pembangunan agribisnis hortikultura perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu sampai ke hilir dan perangkat penunjangnya menuju keseimbangan antara usaha peningkatan produksi, perbaikan distribusi dan peningkatan konsumsi, yang menguntungkan semua pihak. Untuk memetakan kondisi dan permasalahan yang ada, membuat analisis kebutuhan perbaikan, menetapkan target-target perbaikan dan menyusun rencana aksinya perlu digunakan pendekatan *Supply Chain Management (SCM)* atau Pengelolaan Rantai Pasokan.

Pada intinya SCM adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir (konsumen). Konsep SCM

dilakukan agar peningkatan daya saing itu tidak semata dilakukan melalui perbaikan produktivitas dan kualitas produk, tetapi juga melalui pengemasan, pemberian merk, efisiensi, transportasi, informasi, penguatan kelembagaan dan penciptaan inovasi secara kontinyu dan sistematis.

SCM merupakan siklus lengkap produksi, mulai dari kegiatan pengelolaan di setiap mata rantai aktifitas produksi sampai siap untuk digunakan oleh pemakai/user. Pendekatan SCM didasarkan pada; (a) Proses budidaya untuk menghasilkan produk (hortikultura), (b) Mentransformasikan bahan mentah (penanganan panen dan pasca panen), dan (c) Pengiriman produk ke konsumen melalui sistem distribusi.

Dengan demikian dalam penerapan SCM tidak hanya menuntut GAP, tetapi juga mencakup GHP (*Good Handling Practices*), GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan GTP (*Good Trading Practices*).

Untuk menjamin keberhasilan penerapan *Supply Chain Management* (SCM) atau Manajemen Pengelolaan Rantai Pasokan perlu memahami faktor-faktor pendukung keberhasilan antara lain : kebijakan, sumber daya manusia, prasarana, sarana, teknologi, kelembagaan, modal/ pembiayaan, sistem informasi, sosial budaya dan lingkungan lain. Proses aktifitas dalam penerapan SCM memiliki 5 aliran utama yang harus dikelola dengan baik aliran produk, aliran informasi, aliran dana, aliran pelayanan dan aliran kegiatan.

Di dalam strukturisasi rantai pasokan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sbb: 1) identifikasi status rantai pasokan, 2) susun rencana pembenahan rantai pasokan yang bermuara kepada sistem berbasis kontrak, 3) kembangkan sistem informasi yang menghubungkan konsumen-pedagang-petani vice versa, 4) sosialisasikan dan terapkan GAP, GHP, GMP dan GTP, 5) galang dukungan sektor terkait, pelaku bisnis dan masyarakat hortikultura dalam merestrukturisasikan rantai pasokan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah berkembangnya SCM Hortikultura dan terbangun serta tertatanya manajemen rantai pasokan hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah:

1. Teridentifikasinya rantai pasokan
2. Tersusunnya rencana pembenahan rantai pasokan
3. Berkembangnya sistem informasi
4. Diterapkannya GAP, GHP, GNT dan GTP
5. Terjadinya restrukturisasi rantai pasokan

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Propinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada dinas pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 33 propinsi di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan dari pelaksanaan SCM di 33 Propinsi meliputi: Identifikasi SCM Hortikultura, Verifikasi lahan usaha dan champion hortikultura, Sosialisasi SCM Hortikultura, Workshop pembenahan rantai pasokan produsen dan asosiasi hortikultura, Workshop pembentukan *holding company*, pengembangan dan penerapan SCM Hortikultura, Pengembangan kelembagaan, Pelatihan manajemen kebun/ lahan usaha hortikultura, Pemantapan kelompok/asosiasi rantai pasokan

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Bidang Produksi atau Bidang yang menangani hortikultura di propinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi

Penerima manfaat adalah : petugas/petani/pelaku usaha/ pemangku kepentingan di wilayah provinsi

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Dekonsentrasi pada DIPA Satker Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 33 propinsi dan dialokasikan dalam bentuk belanja bahan, barang non operasional lainnya, belanja modal fisik lainnya.

5. Metode

Metoda pelaksanaan kegiatan SCM sebagai berikut:

- 1) Identifikasi SCM Hortikultura dan verifikasi lahan usaha/champion hortikultura dilaksanakan melalui perjalanan dalam rangka pengawalan dan pendampingan serta identifikasi ke kabupaten/kota.
- 2) Sosialisasi SCM Hortikultura dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan stakeholder dan dinas pertanian daerah yang membidangi hortikultura di propinsi
- 3) Workshop pembenahan rantai pasokan produsen dan asosiasi hortikultura dilaksanakan melalui pertemuan dan perjalanan dalam rangka workshop rantai pasokan melibatkan petani/stakeholders terkait dan dinas pertanian di daerah yang membidangi hortikultura.
- 4) Workshop pembentukan holding company dilaksanakan dalam bentuk workshop dan perjalanan fasilitasi pembentukan holding company.

- 5) Pengembangan dan penerapan SCM Hortikultura dilaksanakan dalam bentuk workshop pelaku usaha dan produsen hortikultura, dan perjalanan dalam rangka pertemuan dan pendampingan/pengawalan ke kabupaten/kota.
- 6) Pengembangan kelembagaan dilaksanakan dalam bentuk workshop penumbuhan asosiasi pengusaha dan pedagang hortikultura dan fasilitasi perjalanan penumbuhan asosiasi serta workshop pembenahan rantai pasokan produsen dan asosiasi.
- 7) Pelatihan manajemen kebun/lahan usaha hortikultura dilaksanakan melalui perjalanan dalam rangka pembinaan, pengawalan dan pendampingan oleh dinas pertanian propinsi dengan sasaran petani/stake holder terkait.
- 8) Pemantapan kelompok/asosiasi rantai pasokan dilaksanakan melalui pertemuan sinkronisasi dan koordinasi, penyusunan buku strategi peningkatan margin rantai pasokan, dan perjalanan dalam rangka survey rantai pasok ke daerah.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Data dan informasi mengenai potensi wilayah
2. Data dan informasi tentang penerapan SCM dalam pengembangan agribisnis hortikultura dari berbagai sumber
3. Dana APBN
4. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha, pemangku kepentingan)

B. Keluaran (Output)

1. Teridentifikasinya rantai pasokan dan verifikasi lahan usaha.
2. Terselenggaranya workshop rantai pasokan.
3. Terselenggaranya workshop pelaku usaha dan produsen hortikultura.
4. Terselenggaranya workshop penumbuhan asosiasi
5. Terselenggaranya pertemuan koordinasi
6. Tersusunnya buku strategi peningkatan margin rantai pasokan.

C. Hasil (Outcome)

Terbentuknya *holding company*

Tertatanya rantai pasokan, terjadinya transparansi harga, pembagian keuntungan yang proporsional pada semua titik rantai pasokan.

D. Manfaat (Benefit)

Usaha agribisnis hortikultura lebih berdaya saing.

E. Dampak (Impact)

Pendapatan dan kesejahteraan petani semakin meningkat

Lampiran 2.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENERAPAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)
TAHUN 2010**

No.	PROPINSI
1	Nanggroe Aceh Darussalam
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	Sumatera Selatan
7	Bengkulu
8	Lampung
9	Bangka Belitung
10	Jawa Barat
11	Banten
12	Jawa Tengah
13	DKI Jakarta
14	D.I Yogyakarta
15	Jawa Timur
16	Kalimantan Barat
17	Kalimantan Timur
18	Kalimantan Selatan
19	Kalimantan Tengah
20	Sulawesi Utara
21	Sulawesi Selatan

No.	PROPINSI
22	Sulawesi Tengah
23	Sulawesi Barat
24	Sulawesi Tenggara
25	Bali
26	Nusa Tenggara Barat
27	Nusa Tenggara Timur
28	Gorontalo
29	Papua
30	Papua Barat
31	Maluku
32	Maluku Utara
33	Kepulauan Riau
TOTAL 33 PROPINSI	

3. PELAYANAN TERPADU UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS DI GERBANG EKSPOR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan tanaman hias di dunia semakin meningkat, sehingga peluang pasarnya cukup besar, khususnya tanaman hias tropis yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Indonesia yang kaya akan plasma nutfah dan sumberdaya genetik belum memanfaatkan peluang ini secara optimal. Untuk memenuhi permintaan tanaman hias tropis di pasar luar negeri, para eksportir pada umumnya masih mengandalkan eksploitasi tanaman dari hutan maupun dari pekarangan sekitar rumah penduduk. Sangat sedikit tanaman yang diekspor dilakukan melalui budidaya yang intensif dalam skala yang lebih luas. Kondisi seperti ini mengakibatkan kualitas tanaman yang diekspor kurang baik, tidak seragam, pasokan sangat terbatas yang mengakibatkan kontinuitas ekspor tidak terjamin.

Dalam rangka mendorong ekspor tanaman hias perlu dilakukan modernisasi industri tanaman hias dengan memperbaiki infrastruktur kebun di Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau dan Kepri yang merupakan sentra produksi tanaman hias raphis yang berlokasi di Kota Padang, Kabupaten Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Bintan.

Selain itu dalam rangka mendorong ekspor tanaman hias di daerah perlu pula dukungan pelayanan terpadu untuk

pengembangan ekspor tanaman hias serta bantuan sarana transplanter dan screenhouse di 3 Propinsi tersebut. Untuk itu perlu kiranya pelayanan terpadu yang melibatkan instansi terkait dalam mendukung terlaksananya kawasan sentra tanaman hias orientasi ekspor.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:

1. Memfasilitasi sarana prasarana dan infrastruktur kebun dalam rangka modernisasi industri tanaman hias tropis orientasi ekspor
2. Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hias tropis orientasi ekspor

Sasaran kegiatan adalah :

1. Tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur kebun tanaman hias yang memadai dalam rangka peningkatan produksi dan mutu.
2. Tersedianya produk tanaman hias yang memenuhi persyaratan ekspor (volume dan mutu)

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan pelayanan terpadu untuk mendukung pengembangan tanaman hias di gerbang ekspor dilaksanakan pada dinas pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 3 Propinsi di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

2. Komponen Kegiatan

Komponen Kegiatan Pelayanan Terpadu mendukung Pengembangan Tanaman Hias Gerbang Ekspor di Propinsi meliputi Fasilitasi Ekspor Raphis, Pengembangan Gerbang Ekspor, Peliputan Kawasan Gerbang Ekspor melalui media

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Propinsi yang menangani pembinaan hortikultura. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi, sedangkan penerima manfaat adalah petani tanaman hias anggota Gapoktan di 3 provinsi (Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau)

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA Satker pada Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 3 propinsi dalam bentuk belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya dan perjalanan lainnya pada Dinas Pertanian Propinsi.

5. Metode

Secara umum pelayanan terpadu mendukung pengembangan gerbang ekspor dilaksanakan melalui pertemuan koordinasi, sinkronisasi, rapat teknis, workshop, pendampingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan serta publikasi melalui media dengan melibatkan petani/Gapoktan, stake holder, dinas pertanian propinsi dan instansi terkait lainnya dalam pengembangan gerbang ekspor tanaman hias.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Kegiatan pelayanan terpadu untuk mendukung pengembangan tanaman hias di gerbang ekspor dilaksanakan oleh satker pada dinas pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 9 Kabupaten/Kota pada 3 Propinsi. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.

2. Komponen Kegiatan

Komponen Kegiatan berupa penyediaan sarana pendukung untuk pengembangan tanaman hias ekspor (Raphis)

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian kabupaten/Kota. Penerima manfaat adalah petani tanaman hias anggota Gapoktan atau kelompok tani jika Gapoktan belum terbentuk di 9 kabupaten/kota

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker pada Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di Kabupaten/Kota dengan MAK Belanja Lembaga Sosial Lainnya.

5. Metode

Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian yang ditunjuk.

Dana untuk pengembangan tanaman hias ekspor akan ditransfer ke rekening Gapoktan/Kelompok Tani yang telah terseleksi setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) disepakati dan disetujui oleh tim Teknis Kabupaten/kota. Dana yang dialokasikan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana pendukung pengembangan Raphis berupa Shading house konstruksi ringan , pompa air, mesin kompos, power sprayer, dll. Pengadaan sarana

budidaya dan pelaksanaan dilapangan perlu mendapat pendampingan intensif dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota agar sesuai dengan rancangan pengembangan tanaman hias ekspor tersebut.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN
2. Sumberdaya Manusia (petugas pembina dan petani anggota Gapoktan)
3. Teknologi budidaya Raphis

B. Keluaran (Output)

Terfasilitasinya pengembangan kawasan gerbang ekspor.

Tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur kebun tanaman hias yang memadai dalam rangka peningkatan produksi dan mutu.

C. Hasil (Outcome)

Meningkatnya jumlah sentra tanaman hias orientasi ekspor yang memenuhi standar ekspor.

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya volume produksi dan produktivitas tanaman hias orientasi ekspor di 9 Kabupaten/Kota

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya ekspor tanaman hias tropis.

Lampiran 3.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PELAYANAN TERPADU UNTUK MENDUKUNG
PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS DI GERBANG EKSPOR
TAHUN 2010**

No.	PROPINSI	KAB./KOTA	KOMODITAS
1.	Sumatera Barat	1 Kota Bukittinggi	Raphis
		2 Kota Payakumbuh	Raphis
		3 Kab. Agam	Raphis
		4 Kota Padang Panjang	Raphis
		5 Kota Padang	Raphis
2.	Riau	6 Kab. Kampar	Raphis
		7 Kota Pekanbaru	Raphis
3.	Kepulauan Riau	8 Kab. Bintan	Raphis
		9 Kota Batam	Raphis
JUMLAH		9 KAB/KOTA	

4. PELAYANAN TERPADU UNTUK MENDUKUNG PERBAIKAN MUTU KEBUN BUAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan global menyebabkan iklim kompetisi menjadi sangat terbuka. Kondisi ini menuntut setiap negara untuk menghasilkan produk dengan mutu sesuai dengan standar internasional. Agar suatu produk bisa menembus pasar global diperlukan berbagai persyaratan yang tidak ringan. Bagi negara-negara maju dengan teknologi yang sudah berkembang sangat baik tentu tidak akan mengalami kesulitan.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar akan menjadi pasar komoditas pertanian yang sangat menarik bagi negara-negara penghasil pangan potensial termasuk pasar komoditas hortikultura khususnya buah-buahan. Potensi komoditas buah di Indonesia sangat besar, dengan iklim tropis yang sangat mendukung serta keanekaragaman komoditas yang dimiliki, apabila digarap dengan serius, Indonesia bisa menjadi negara utama penghasil buah di dunia.

Dari angka-angka statistik, produksi buah-buahan kita semakin meningkat dari waktu ke waktu dan apabila diperhatikan mutu buah yang dihasilkan petani-petani kita juga semakin baik. Namun peningkatan tersebut masih belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari belum banyaknya produk buah-buahan dari kebun yang mampu menembus pasar ekspor, sedangkan buah yang

diperdagangkan di pasar-pasar buah kita penampilannya masih jauh dari memuaskan.

Berbagai upaya telah dijalankan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian, untuk mengembangkan komoditas buah-buahan agar produksi maupun mutunya semakin baik. Sejak TA. 1991/1992 pemerintah telah membangun kebun buah-buahan di seluruh provinsi. Pada tahun 2002 juga telah dicanangkan program pengembangan agribisnis hortikultura melalui pemanfaatan dana dekonsentrasi. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pula pengembangan agribisnis buah di lebih dari 130 kabupaten, 33 provinsi. Ke depan pemerintah melalui kegiatan pengembangan komersialisasi kebun buah akan memperbaiki kebun-kebun buah yang sudah ada namun kurang produktif, tidak berdaya saing karena varietas yang dulu dikembangkan, saat ini sudah tidak diminati oleh pasar. Melalui teknologi "top working" kebun-kebun tersebut akan "diremajakan" menjadi kebun baru dengan varietas baru namun tanpa harus mengganti dengan tanaman yang baru sehingga proses ini akan berjalan lebih cepat.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah :

1. Meningkatkan daya saing durian dan jeruk melalui penggantian varietas dan perbaikan mutu kebun yang sudah ada.

2. Menyediakan fasilitas pendukung peningkatan daya saing kebun buah melalui sarana dan prasarana perbenihan seperti BF, BPMT, Pohon Induk dan Mata Tempel.
3. Meningkatkan kemampuan petugas dan petani dalam memperbaiki mutu dan produksi durian dan jeruk.

Sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya daya saing buah durian dan jeruk di sentra produksi melalui teknologi *top working* dan penyediaan infrastruktur perbenihan.
2. Meningkatnya kemampuan petugas dan petani dalam penerapan teknologi budidaya "top working" pada komoditas durian dan jeruk.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada dinas pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 10 provinsi sentra produksi buah yang tercantum pada Lampiran 4.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan pelayanan terpadu untuk mendukung perbaikan mutu kebun buah meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas sistem perbenihan (BBI dan atau BF dan atau Blok Penggandaan mata tempel (BPMT) dan atau pohon induk dan mata tempel).
- b. Pemantapan teknologi *Top Working*
- c. Pendampingan dan pembinaan

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Propinsi yang menangani pembinaan hortikultura dan Petugas Balai Benih Induk, dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Penerima manfaat adalah petani tanaman buah (durian dan jeruk) anggota Gapoktan/Kelompok tani

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker pada Dinas Pertanian yang membidangi hortikultura di 10 propinsi pada MAK belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, dan perjalanan lainnya.

5. Metode

Kegiatan perbaikan dan komersialisasi kebun buah Jeruk dan Durian dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan, pembinaan/pelatihan dan pemantapan teknologi "Top Working", serta pengawalan dan pendampingan yang melibatkan Dinas Pertanian Propinsi dan kabupaten/kota, BPTP dan Balitjestro/ Balitbu serta petani/Gapoktan di Sentra Kawasan Jeruk dan Durian.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada dinas pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura di 15 Kabupaten/Kota sentra produksi buah (Lampiran 4).

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan pelayanan terpadu untuk mendukung perbaikan mutu kebun buah di kabupaten/kota meliputi Jeruk dan Durian

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura dan Petugas Balai Benih Induk dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian kabupaten/Kota dengan pendampingan dari BPTP, Balitjestro/Balitbu. Penerima manfaat adalah : petani tanaman buah (durian dan jeruk) anggota Gapoktan/Kelompok Tani

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker pada Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di Kabupaten/Kota dengan MAK Belanja barang operasional lainnya, belanja barang non operasional lainnya, belanja perjalanan dan belanja fisik lainnya.

5. Metode

Secara rinci metoda pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu untuk mendukung perbaikan mutu kebun buah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/kota dan Balai Benih Induk dalam rangka memperbaiki kualitas kebun buah (durian dan jeruk) dengan cara mengganti tanaman dengan varietas unggul komersial melalui teknologi "top working" pada kebun durian dan jeruk yang telah ada.
- 2) Kegiatan Penerapan "top working" tersebut difasilitasi dengan penyediaan alsintan untuk digunakan oleh

penangkar benih dan petani buah dengan bimbingan dan pendampingan oleh petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota, BPTP, Balitjestro/ Balitbu dan BBI dengan mengunjungi secara intensif kebun-kebun buah yang melakukan peremajaan tanaman melalui teknologi "top working" untuk menjamin keberhasilan penerapan teknologi tersebut.

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana sistem perbenihan yang dapat mencakup pembuatan/ perbaikan BF atau BPMT, pohon induk maupun mata tempel serta pengadaan modal peralatan dan mesin untuk pemeliharaan kebun buah.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana
2. Sumber Daya Manusia (Petugas dan petani buah)
3. Paket teknologi perbenihan buah
4. Teknologi maju budidaya buah

B. Keluaran (Output)

1. Tersedianya BF/BPMT yang dapat mendukung upaya perbaikan mutu kebun Durian dan Jeruk.
2. Terlaksananya kegiatan magang/pelatihan teknologi “top working” komoditas durian dan jeruk bagi petugas dan petani.

C. Hasil (Outcome)

Berkembangnya teknologi “top working” untuk memperbaiki mutu kebun buah dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas buah durian dan jeruk.

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya daya saing komoditas durian dan jeruk.

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya kesejahteraan petani buah terutama durian dan jeruk.

Lampiran 4.**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PELAYANAN TERPADU UNTUK Mendukung Perbaikan
MUTU KEBUN BUAH**

No.	PROPINSI	KAB./KOTA	KOMODITAS
1	Bangka Belitung	1 Kab. Bangka Selatan	Jeruk
2	Jawa Barat	2 Kab. Bogor	Durian
		3 Kab. Garut	Jeruk
		4 Kab. Majalengka	Durian
3	Jawa Tengah	5 Kab. Magelang	Jeruk
4	Nusa Tenggara Barat	6 Kab. Lombok Barat	Durian
5	Bali	7 Kab. Bangli	Jeruk
6	Sulawesi Selatan	8 Kab. Luwu Utara	Durian
7	Sulawesi Barat	9 Kab. Mamuju Utara	Jeruk
8	Kalimantan Barat	10 Kab. Sambas	Jeruk
		11 Kab. Sanggau	Durian
9	Kalimantan Selatan	12 Kab. Barito Kuala	Jeruk
10	Kalimantan Timur	13 Kab. Nunukan	Durian
		14 Kab. Kutai Timur	Jeruk
		15 Kab. Bulungan	Durian
	10 PROPINSI	15 KAB/KOTA	

**PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN PERTANIAN, ORGANIK
DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
(KODE 1558)**

1. PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA ORGANIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran sehat yang diproduksi secara ramah lingkungan dan tingginya nilai jual sayuran organik di pasaran mendorong petani untuk melakukan usaha budidaya sayuran secara organik. Budidaya organik dilakukan tidak berbeda dengan budidaya sayuran yang sudah biasa dilakukan petani, namun dalam pelaksanaannya di lapangan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, pengaturan pola tanam, dan pengolahan lahan yang minimum. Lebih ditekankan dan disarankan tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintesis, disertai dengan tindakan konservasi lahan.

Budidaya sayuran organik sudah mulai berkembang baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, dengan komoditas sayuran yang sangat beragam. Budidaya organik juga didorong pengembangannya dalam rangka mengatasi kelangkaan dan mahalnya pupuk dan pestisida buatan, disamping memperbaiki kondisi fisik tanah secara lestari serta meningkatkan mikrobiologis dalam tanah dalam menunjang sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainable*). Namun sampai saat ini produksinya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya.

Dalam upaya pengembangan budidaya sayuran yang aman konsumsi, bermutu baik dan ramah lingkungan perlu diterapkan

teknologi budidaya yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Usahatani sayuran yang dilaksanakan harus menjaga agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada lahan yang digarapnya. Oleh karena itu perlu diupayakan berbagai kegiatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Program pengembangan sayuran organik di daerah sebagai *pilot project* di setiap propinsi agar dapat dijadikan tempat untuk belajar bagi daerah lain yang memiliki potensi untuk pengembangan sayuran organik.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai teknologi budidaya sayuran organik yang baik dan ramah lingkungan;
2. Memberikan fasilitasi bimbingan, pemahaman dan pengakuan terhadap sistem pertanian organik yang dilakukan oleh petani dan pelaku usaha sayuran organik.

Sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan stakeholders dalam melaksanakan pertanian organik pada komoditas sayuran.
2. Berkembangnya budidaya sayuran organik dengan penggunaan input dan sumber daya lokal.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian di 9 Provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia (Lampiran 5).

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan terdiri dari : Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Sayuran Organik, Pelatihan Penyusunan SOP/ GAP Organik, Pendampingan Sayuran Organik, Registrasi Lahan Sayuran Organik, Sosialisasi GAP Organik dan Identifikasi Komoditi/Lahan Usaha Sayuran Organik, Workshop Petani Sayuran Organik, Temu Teknis Sayuran Organik, Operasional dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Organik

3. Pelaksana/ Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Propinsi yang menangani pembinaan hortikultura. Penanggung jawab dari kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura Organik adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petani sayuran organik anggota Gapoktan yang berada pada 9 kabupaten/kota pada 9 provinsi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada Dinas Pertanian Propinsi dalam bentuk Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Lainnya, Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan dan Belanja Sewa.

5. Metode

Pengembangan kawasan sayuran organik di lokasi kegiatan dilakukan dalam bentuk pembinaan, koordinasi, pelatihan/ magang, penyebarluasan informasi, sosialisasi, penyusunan SOP dan buku kerja sayuran organik, registrasi lahan hortikultura organik dan sebagainya. Pembinaan dilakukan oleh petugas pembina dari pusat dan propinsi.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/ Kota

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada sentra produksi sayuran di 9 Kabupaten/ Kota (Lampiran 5)

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan berupa Pengembangan Kawasan Sayuran Organik

3. Pelaksana/ Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura dengan penanggung jawab Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat dari kegiatan tersebut adalah petani sayuran organik anggota Gapoktan atau Kelompok Tani jika belum ada Gapoktan yang berada pada pada 9 kabupaten/kota.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota dengan MAK Belanja Lembaga Sosial Lainnya. Satu unit kawasan sayuran organik mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan sayuran organik sesuai RUK dengan cakupan jumlah petani dan luasan areal disesuaikan dengan jenis komoditas yang dikembangkan

5. Metode

Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian yang ditunjuk.

Dana untuk pengembangan sayuran organik akan ditransfer ke rekening Gapoktan/Kelompok Tani yang telah terseleksi setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) disepakati dan disetujui oleh tim Teknis Kabupaten/kota.

Alokasi dana diatur dengan komposisi **20-25%** digunakan untuk penguatan kelembagaan usaha hortikultura menuju kemandirian petani yang terdiri atas (1) penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha (fasilitasi pendampingan

oleh petugas, PPL, dll, kelompok usaha, Gapoktan, asosiasi, koperasi, perusahaan), (2) permodalan usaha (lembaga keuangan mikro, koperasi, unit simpan pinjam, dll), (3) manajemen usaha (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), (4) jaringan usaha (kerjasama kemitraan usaha, menjaring investor, dll) sedangkan **75-80 %** digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sayuran organik berupa : penyediaan dokumen untuk penerapan GAP/SOP organik (pembuatan dan perbanyak buju SOP organik, buku catatan, ATK, dll), pengadaan sarana produksi (benih, pupuk organik, bio pestisida, dll), pengadaan sarana sarana/peralatan budidaya (alsintan, sgading net, kubung, mulsa plastik, polybag, dll), pengadaan sarana peralatan panen/pasca panen dan pengadaan sarana pembuatan pupuk organik/kompos, dll.

Kegiatan ini difokuskan ke masing-masing satu kabupaten di setiap propinsi sebagai pilot project atau daerah percontohan bagi kabupaten/kota lain yang akan mengembangkan sayuran organik. Pemilihan jenis komoditas yang dikembangkan disesuaikan dengan permintaan pasar, dan memperhatikan kesesuaian dengan agroekosistem setempat.

Pelaksanaan kegiatan dengan belanja lembaga sosial lainnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan non fisik dan fisik yang secara rinci dituangkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana
2. SDM (petugas, petani, dan narasumber/ahli atau praktisi di bidangnya).

Data dan Informasi (agroklimat, sumber daya alam, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan budidaya sayuran organik).

3. Teknologi budidaya sayuran yang mengacu pada penerapan GAP/SOP organik dan budidaya ramah lingkungan.

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya koordinasi dan pendampingan untuk pengembangan sayuran organik di 9 kabupaten pada 9 propinsi
2. Terlaksananya budidaya sayuran organik oleh Gapoktan/Kelompok Tani di 9 kabupaten pada 9 propinsi.

C. Hasil (Outcome)

Berkembangnya sayuran organik di 9 kabupaten pada 9 propinsi

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya produksi sayuran organik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun ekspor.

E. Dampak (Impact)

1. Meningkatnya kesejahteraan petani sayuran organik dan meningkatnya kualitas lingkungan akibat pengurangan penggunaan input produksi kimia sintesis

Lampiran 5.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA ORGANIK**

No.	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS *)
1	SUMATERA BARAT	1 Kab. Agam	Sayuran Organik
2	JAWA BARAT	2 Kab. Cianjur	Sayuran Organik
3	JAWA TENGAH	3 Kab. Semarang	Sayuran Organik
4	JAWA TIMUR	4 Kab. Malang	Sayuran Organik
5	KALIMATAN BARAT	5 Kab. Pontianak	Sayuran Organik
6	NUSA TENGGARA BARAT	6 Kab. Lombok Timur	Sayuran Organik
7	SULAWESI SELATAN	7 Kab. Bantaeng	Sayuran Organik
8	SULAWESI UTARA	8 Kab. Minahasa	Sayuran Organik
9	BALI	9 Kab. Tabanan	Sayuran Organik
9 Propinsi		9 Kabupaten/ Kota	

*) Disesuaikan dengan potensi wilayah dan kesepakatan Gapoktan/
kelompok tani

2. PENGEMBANGAN HORTIKULTURA DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)/ DAERAH RAWAN EROSI DAN LONGSOR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah merupakan kawasan penyangga sumber air tanah dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan hidup. Lahan-lahan di kawasan DAS berfungsi untuk menangkap curah hujan, menyimpan dan kemudian mengalirkan ke satu titik patusan (out let). Disamping itu, Daerah Aliran Sungai juga merupakan salah satu alternatif daerah pengembangan komoditas hortikultura, khususnya buah-buahan tahunan.

Akibat tekanan jumlah penduduk yang meningkat dengan pesat, illegal logging dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai pada umumnya lahan-lahan di kawasan DAS banyak mengalami penurunan fungsi sebagai daerah tangkapan air terutama akibat dari alih fungsi lahan baik alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian maupun lahan pertanian menjadi bangunan/perumahan. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah air hujan yang masuk dan terserap kedalam tanah yang mengakibatkan timbulnya aliran permukaan (run off) sehingga terjadi fluktuasi debit sungai yang tinggi antara banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Disamping banjir dan kekeringan, degradasi sumber daya alam di DAS inipun sering mengakibatkan sedimentasi dan tanah longsor

yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor adalah memperbaiki sumber daya alam di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) khususnya di daerah hulu melalui penanaman tanaman konservasi (buah-buahan). Jenis buah-buahan yang dikembangkan sebagai tanaman konservasi adalah tanaman buah-buahan yang berumur panjang (tahunan), mempunyai perakaran dalam, kanopi/ tajuk yang luas dan mempunyai nilai komersial dan berpotensi untuk dijual dalam bentuk segar atau olahan yang dapat dikombinasikan dengan tanaman perdu, terna dan merambat. Disamping itu, pengembangan buah-buahan juga dinilai cukup efektif dari aspek penghijauan, karena masyarakat di sekitar DAS juga diharapkan akan memelihara tanaman yang ada karena merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan adalah:

1. Meningkatkan fungsi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu sebagai daerah tangkapan/resapan air
2. Meningkatkan upaya pengembangan buah-buahan di kawasan DAS

Sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pelestarian lingkungan khususnya di sekitar wilayah DAS dan sekitar perkotaan melalui pemanfaatan tanaman buah
2. Meningkatnya dukungan terhadap penanganan dampak di Daerah Rawan Longsor dan Erosi

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi di wilayah Indonesia yang mempunyai daerah aliran sungai/ daerah rawan longsor. (Lampiran 6)

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan terdiri dari : Pengawasan Pengembangan Hortikultura di DAS dan Daerah rawan Longsor, Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Hortikultura di DAS dan Daerah Rawan Longsor, Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Komoditas Hortikultura di DAS, Pelatihan Petani Penangkar Benih di Lokasi DAS, Workshop Teknik Penerapan Tanaman yang baik/ GAP di DAS/ Daerah Rawan Longsor.

3. Pelaksana/ Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Propinsi yang menangani pembinaan hortikultura. Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Daerah Aliran Sungai/ Daerah Rawan Erosi dan Longsor adalah petani tanaman buah anggota poktan/ Gapoktan yang berada pada DAS di 7 provinsi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan sebagai dana Dekonsentrasi pada DIPA Satker Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) dalam bentuk Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Lainnya, Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan dan Belanja Sewa.

5. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan non fisik seperti pendampingan, bimbingan, pembinaan pengembangan hortikultura DAS dan rawan longsor untuk perbaikan aspek lingkungan di sekitar kawasan DAS/ daerah rawan erosi.

Metoda pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Pertemuan dalam rangka pembuatan juklak Pengembangan komoditas Hortikultura Organik dan atau ramah lingkungan, Juklak Penanggulangan Daerah Rawan Longsor dan Erosi
- b. Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Hortikultura Organik dan Pengembangan Buah-Buahan di daerah DAS
- c. Perjalanan dalam rangka pembinaan dan pengawalan pengembangan pertanian organik, penanggulangan daerah rawan longsor dan erosi

B. Pelaksanaan di Kabupaten/ Kota

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di 18 Kabupaten/ Kota yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 7 Provinsi di Indonesia (Lampiran 6)

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan berupa penyediaan paket bantuan untuk pengembangan tanaman buah pada DAS/ daerah rawan erosi/longsor

3. Pelaksana/ Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menangani pembinaan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian kabupaten/Kota. Sedangkan penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Daerah Aliran Sungai/ Daerah Rawan Erosi dan Longsor adalah petani tanaman buah anggota Kelompok Tani/Gapoktan yang berada pada Daerah Aliran Sungai di 18 kabupaten/kota pada 7 provinsi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari dana APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Akun Belanja Lembaga Sosial Lainnya. Satu unit kegiatan pengembangan hortikultura pada DAS mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai

kegiatan sesuai RUK dengan cakupan jumlah petani dan luasan areal disesuaikan dengan jenis komoditas yang dikembangkan

5. Metode

Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian yang ditunjuk.

Dana untuk pengadaan alsintan akan ditransfer ke rekening Gapoktan/Kelompok Tani yang telah terseleksi setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) disepakati dan disetujui oleh tim Teknis Kabupaten/kota. Alokasi dana diatur dengan komposisi **20-25%** digunakan untuk penguatan kelembagaan usaha hortikultura menuju kemandirian petani yang terdiri atas (1) penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha (kelompok usaha, Gapoktan, asosiasi, koperasi, perusahaan), (2) permodalan usaha (lembaga keuangan mikro, koperasi, unit simpan pinjam,dll), (3) manajemen usaha (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), (4) jaringan usaha (kerjasama kemitraan usaha, menjaring investor, dll) sedangkan **75-80 %** digunakan untuk kegiatan Pengembangan DAS berupa: pembentukan kebun bibit desa, fasilitasi sarana dan prasarana (shading net, seedling/polibag dan mata tempel), pengadaan bibit buah-buahan termasuk bibit buah-buahan untuk tanaman sela,

pengadaan sarana produksi (pupuk, pestisida), penanaman dan sarana pemeliharaan tanaman.

Jenis buah-buahan yang dikembangkan dengan mempertimbangkan sistem perakaran, tajuk dan mempunyai nilai komersial seperti durian, manggis, rambutan, alpukat, jeruk dll yang dapat dikombinasikan dengan tanaman perdu seperti Jeruk, Salak serta tanaman terna seperti Pisang, Nenas dan tanaman merambat seperti Semangka dan Melon.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN untuk Pengembangan Hortikultura di DAS
2. Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan pengembangan DAS
3. Teknologi Budidaya Buah
4. Data informasi keragaan Daerah Aliran Sungai dan potensinya.

B. Keluaran (Output)

1. Terbangunnya kelompok tani yang mampu menghasilkan benih tanaman hortikultura bermutu melalui kerjasama dengan BBI
2. Tersedianya benih buah bermutu
3. Terlaksananya penanaman buah di DAS hulu

C. Hasil (Outcome)

1. Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam pengembangan DAS
2. Meningkatnya jumlah tegakan tanaman buah pada DAS

D. Manfaat (Benefit)

1. Meningkatnya fungsi aspek lingkungan di kawasan DAS berupa berkurangnya daerah rawan longsor dan banjir di hulu DAS

2. Meningkatnya jumlah produksi buah-buahan

E. Dampak (Impact)

1. Meningkatnya fungsi DAS untuk menunjang kegiatan perekonomian berbasis pertanian
2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan DAS dari usaha budidaya buah-buahan.

Lampiran 6.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PADA DAS/ DAERAH
RAWAN EROSI ATAU LONGSOR**

No.	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
1	BENGKULU	1 Kab. Rejang Lebong	Durian, Manggis
2	JAWA BARAT	2 Kab. Bandung	Alpukat
		3 Kab. Cianjur	Pisang, Durian, Melinjo
		4 Kab. Kuningan	Mangga, Jeruk
		5 Kab. Sukabumi	Pisang, Manggis, Alpukat
		6 Kab. Tasikmalaya	Manggis, Salak, Rambutan
3	JAWA TENGAH	7 Kab. Banjarnegara	Salak, Durian
		8 Kab. Magelang	Jeruk Keprok
		9 Kab. Wonosobo	Jeruk Keprok, Durian
4	JAWA TIMUR	10 Kab. Malang	Durian
		11 Kota Batu	Jeruk
5	SULAWESI SELATAN	12 Kab. Gowa	Rambutan, Melinjo
6	JAMBI	13 Kerinci	Jeruk
		14 Muaro Jambi	Durian, Duku
7	LAMPUNG	15 Lampung Barat	Pisang, Jeruk Keprok
		16 Lampung Selatan	Pisang, Durian
		17 Lampung Tengah	Durian
		18 Tanggamus	Manggis
TOTAL		7 PROPINSI, 18 KABUPATEN/ KOTA	

3. PENGEMBANGAN ALTERNATIVE DEVELOPMENT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman ganja merupakan salah satu komoditas yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan menjadi salah satu objek pembinaan yang harus terus menerus dilakukan. Salah satu daerah produsen utama ganja di Indonesia adalah Provinsi Aceh. Konon, rasa ganja yang berasal dari Aceh menduduki peringkat pertama di dunia, karena tingginya kandungan zat aditif *Tetra Hydro Cannabinol* (THC) sebesar 9,7%. Pada awalnya penanaman ganja di Aceh dimanfaatkan hanya sebagai usaha sampingan yaitu untuk relaksasi dan sebagai bumbu penyedap, pelunak daging, pereda rasa sakit, dan sebagai penanggulangan serangan/pengusir hama. Namun penanaman ganja ini dilakukan secara ilegal dan atas bujukan/rayuan agen-agen/kelompok sindikat perdagangan ganja dari luar NAD.

Meskipun bencana tsunami telah menimpa wilayah Aceh tetapi tidak menghancurkan penanaman gelap ganja, karena ditanam di lereng-lereng gunung. Oleh karena itu, perdagangan gelap ganja masih terus berlanjut dan bahkan meningkat setelah pasca tsunami. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penanaman ganja tersebut memerlukan pengontrolan yang sangat ketat, baik terhadap penanaman, produksi, perdagangan maupun penyalahgunaan yang illegal

melalui penegakan hukum dan tindakan pengembangan alternatif.

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ganja ini telah dilakukan melalui program pengembangan alternatif. Komoditas pertanian yang dapat dijadikan atau dikembangkan dalam rangka mendukung program pengembangan alternatif adalah tanaman hortikultura (sayuran, biofarmaka, buah, dan tanaman hias), tanaman perkebunan dan peternakan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dalam mendesain program pembangunan alternatif bagi tanaman ganja, harus dibangun sebuah mekanisme pengawasan yang partisipatif oleh masyarakat serta pemuka adat dan berjalan secara berkesinambungan. Disamping itu, Pengembangan Alternative Development ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Terintegrasi berbagai kegiatan dan institusi, ditangani secara menyeluruh (holistic)
2. Cakupan ; demand reduction, kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur
3. Pembangunan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dalam melepaskan ketergantungan dalam illicit drugs
4. Langkah komplementer penghapusan ganja dan penegakan hukum.

Sasaran jangka panjang program pengembangan Pembangunan Alternatif adalah musnahnya tanaman ganja di NAD. Aktualisasi Pertanian Alternatif ini diformulasikan dalam bentuk program jangka pendek dan jangka panjang yang diajukan sebagai pengganti ganja, disusun dengan melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran program, serta mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat yang ada, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Untuk mencapai sasaran tersebut, Departemen Pertanian telah menyusun rencana jangka pendek (1-2 tahun) dan jangka menengah (5-10 tahun) Pertanian Alternatif.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:

1. Menyebarkan informasi tentang konsep pengembangan alternatif substitusi tanaman ganja kepada masyarakat luas yang berada di sekitar wilayah bekas penanaman ganja khususnya di Propinsi NAD atau di wilayah lain yang ditengarai terdapat penanaman ganja.
2. Merubah perilaku masyarakat yang melakukan kesalahan dalam memperoleh pendapatan yang tinggi dengan penanaman ganja ke usaha pertanian yang lebih aman dan berkah.
3. Meningkatkan kesejahteraan petani/ kelompok tani dan masyarakat melalui pengembangan alternatif berbagai jenis tanaman prospektif bernilai tinggi.

Sasaran kegiatan adalah:

1. Tersebarinya informasi tentang konsep pengembangan alternatif substitusi tanaman ganja kepada masyarakat luas yang berada di sekitar wilayah bekas penanaman ganja khususnya di Propinsi NAD atau di wilayah lain yang ditengarai terdapat penanaman ganja.
2. Terjadi perubahan perilaku masyarakat yang melakukan kesalahan dalam memperoleh pendapatan yang tinggi dengan penanaman ganja ke usaha pertanian yang lebih aman dan berkah.
3. Meningkatnya usahatani tanaman hortikultura di wilayah NAD sebagai alternatif pengganti tanaman ganja dan peningkatan kesejahteraan petani/kelembagaan dan masyarakat melalui pengembangan alternatif berbagai jenis tanaman prospektif bernilai tinggi.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Dinas Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan terdiri dari: Sosialisasi P4GN, Pembinaan dan Monitoring Pengembangan *Alternative Development* Hortikultura di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Gayo Lues.

3. Pelaksana/ Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian Propinsi yang menangani pembinaan hortikultura. Penanggung jawab kegiatan Pengembangan *Alternative Development* adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petani hortikultura anggota Gapoktan yang berada pada 3 kabupaten/kota di provinsi Aceh.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada

Dinas Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bentuk Belanja Bahan, Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Lembaga Sosial Lainnya.

5. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan *Alternative Development* dijabarkan sebagai Belanja Bahan, Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Lembaga Sosial Lainnya (bantuan sarana pendukung untuk pengembangan hortikultura) yang dipergunakan untuk memfasilitasi Pengembangan *Alternative Development*.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/ Kota

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada 3 Kabupaten/ Kota yang terdapat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu: Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Dinas Pertanian Kabupaten Biruen, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan terdiri dari pengembangan hortikultura sebagai komoditas alternatif pengganti tanaman ganja.

3. Pelaksana/ Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah petugas Dinas Pertanian provinsi yang menangani pembinaan hortikultura, yaitu petugas yang berada di 3 Dinas Pertanian Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Gayo Lues yang berada di Propinsi Nanggroe aceh Darussalam. Penanggung jawab kegiatan Pengembangan *Alternative Development* adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan penerima manfaat dari kegiatan tersebut adalah petani hortikultura anggota Gapoktan yang berada pada 3 kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan dialokasikan pada pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Satu unit kegiatan pengembangan hortikultura pada daerah rawan penanaman ganja mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang akan digunakan sesuai RUK dengan cakupan jumlah petani dan luasan areal disesuaikan dengan jenis komoditas yang dikembangkan.

5. Metode

Kegiatan Pengembangan *Alternative Development* dilaksanakan di 3 kabupaten yang disinyalir merupakan daerah rawan untuk penanaman ganja, yaitu Kabupaten

Aceh Besar, Gayo Lues, Bireun serta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian yang ditunjuk.

Dana untuk pengadaan alsintan akan ditransfer ke rekening Gapoktan/Kelompok Tani yang telah terseleksi setelah Rencana Usaha Kelompok (RUK) disepakati dan disetujui oleh tim Teknis Kabupaten/kota. Alokasi dana diatur dengan komposisi **20-25%** digunakan untuk penguatan kelembagaan usaha hortikultura menuju kemandirian petani yang terdiri atas (1) penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha (kelompok usaha, Gapoktan, asosiasi, koperasi, perusahaan), (2) permodalan usaha (lembaga keuangan mikro, koperasi, unit simpan pinjam,dll), (3) manajemen usaha (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), (4) jaringan usaha (kerjasama kemitraan usaha, menjaring investor, dll) sedangkan **75-80 %** digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman hortikultura sesuai kondisi agroklimat di wilayah masing-masing berupa bantuan sarana pendukung budidaya hortikultura (saprodi, pengadaan sarana/peralatan budidaya, pengadaan sarana/peralatan panen dan pasca panen).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN
2. Sumberdaya manusia (Petugas dan petani)
3. Teknologi budidaya komoditas hortikultura

B. Keluaran (Output)

Terlaksananya kegiatan pengembangan hortikultura pada daerah rawan penanaman ganja di 3 Kabupaten.

C. Hasil (Outcome)

Berkembangnya usaha agribisnis hortikultura sebagai pengganti tanaman ganja

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya produksi hortikultura pada daerah rawan penanaman ganja

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya kesejahteraan petani pada daerah rawan penanaman ganja

Lampiran 7.

**DAFTAR LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN ALTERNATIVE DEVELOPMENT**

No.	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1 Kab. Aceh Besar	Pisang, Jamur merang, Sayuran, Biofarmaka
		2 Kab. Biruen	Jeruk, Sayuran, Biofarmaka
		3 Kab. Gayo Lues	Sayuran, Biofarmaka
1 Propinsi		3 Kabupaten/ Kota	